

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari kemajuan sumber daya manusianya. Pembangunan sumber daya manusia pada dasarnya jauh lebih penting daripada pembangunan infrastruktur. Salah satu upaya pembangunan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Salah satu bentuk pendidikan di Indonesia adalah pondok pesantren yang selanjutnya akan disingkat Ponpes.

Ponpes merupakan lembaga pendidikan yang sudah sangat lama berkembang di Indonesia. Ponpes merupakan sebuah lembaga pendidikan khususnya dalam bidang Agama Islam. Ponpes telah lama tumbuh di Indonesia jauh sebelum sekolah-sekolah umum berdiri. Seperti halnya yang diungkapkan Sujoko makna pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran Islam non klasikal, dimana Kiai mengajarkan ilmu agama kepada peserta didik berdasarkan kitab yang ditulis dalam Bahasa Arab dan para peserta didik tinggal di pondok dalam pesantren tersebut (Noor, 2009). Sedangkan Nurkholis Madjid menyatakan pesantren adalah lembaga yang bisa dikatakan merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional. Dari segi historis Ponpes tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*Indigenous*) (Madjid, 1997).

Dalam Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1979 tentang Bantuan Kepada Pondok Pesantren, maka Ponpes dapat dikategorikan menjadi:

- a) Pondok pesantren tipe A, yaitu Ponpes yang seluruhnya dilaksanakan secara tradisional.
- b) Pondok pesantren tipe B, yaitu Ponpes yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal (madrasi).

- c) Pondok pesantren tipe C, yaitu Ponpes yang hanya merupakan asrama sedangkan peserta didiknya belajar di luar.
- d) Pondok pesantren tipe D, yaitu Ponpes yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah.

Berdasarkan pengertian pesantren di atas, peran penting pesantren dalam membentuk generasi masa depan bangsa merupakan wujud masyarakat yang cerdas, tidak hanya keilmuan, tetapi juga mental dan spritual. Ponpes hendaknya mendapatkan pembinaan yang tepat untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Kompleksitas permasalahan di Indonesia, dalam pembangunan mental dan spritual harus beriringan dengan keilmuan. Pesantren merupakan salah satu wadah yang dapat membina mental dan spritual generasi bangsa. Melihat permasalahan ini, keberadaan pesantren menjadi sangat penting.

Hal ini terlihat dengan banyaknya jumlah Ponpes dan peserta didik di Indonesia yang berjumlah 28.691 unit dengan jumlah peserta didik yang mencapai 4.028.660 peserta didik. Jumlah ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang mempercayakan pendidikan putra putrinya di Ponpes. Masyarakat berharap ilmu agama merupakan pondasi yang utama dalam pendidikan.

Jika dilihat berdasarkan *Education Management Information Sistem (EMIS)* Kementerian Agama jumlah Ponpes di DKI Jakarta sebanyak 118 Ponpes. Salah satu pesantren yang ada di DKI Jakarta adalah Ponpes Daarul Rahman. Ponpes ini terletak di jalan Cipedak Mohammad Kahfi 2 RT 06/06, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ponpes Ini merupakan asuhan Kiai Prof. Dr. Syukron Ma'mun, Lc., MA. Berdasarkan tipe pondok pesantren, maka Ponpes Daarul Rahman merupakan Ponpes tipe D.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab VI pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas jalur pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Apabila dikaitkan dengan jalur pendidikan, jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Ponpes Daarul Rahman termasuk ke dalam jalur pendidikan formal. Ini dibuktikan bahwa peserta didik tamatan Ponpes Daarul Rahman dapat masuk ke perguruan tinggi atau sekolah tinggi lainnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini dikarenakan ijazah Ponpes Daarul Rahman statusnya disamakan.

Dampak dari fenomena-fenomena yang terjadi serta tuntutan reformasi total, yakni dengan diterapkannya pembaruan sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik. Sehingga lembaga pendidikan diatur dalam kebijakan pemerintah dalam bentuk Manajemen Berbasis Sekolah atau yang akan disingkat selanjutnya MBS.

Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 ayat 1 yang menyatakan bahwa: Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah. Serta Peraturan Pemerintah (PP) No.13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 pasal 49 ayat (1) tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VIII Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan

yang menyatakan: Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas (PP Nomor 13, 2015).

MBS merupakan pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara otonomi (mandiri) oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam rangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam pengambilan keputusan (Slamet, 2000). Diperkuat dengan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 16 menyatakan: “Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat (Undang-Undang Nomor 20, 2003).

Melihat pengertian di atas, MBS yang diatur pada tahun 2003 ini tentunya dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan peran serta masyarakat. Beberapa lembaga pendidikan belum menerapkan MBS secara optimal. Akan tetapi Ponpes Daarul Rahman telah menerapkan MBS sejak awal berdirinya Ponpes ini. Berdiri sejak tahun 1975 merupakan Ponpes tertua di Jakarta dikenal dengan sebutan “Oase Spiritual di Jantung Jakarta”. Dimulai dari prinsip otonomi/kemandirian pada penggunaan kurikulum yang memiliki sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum pesantren *salafiyah* dan pesantren modern. Hal ini sejalan dengan penelitian Abawihda dalam hal kurikulum yang dikembangkan di pesantren itu dibedakan menjadi dua jenis sesuai dengan jenis pola pesantren itu sendiri, yaitu: pesantren salaf (tradisional) dan pesantren modern (Abawihda, 2005).

Kurikulum pesantren *salafiyah* adalah bentuk asli dari lembaga pesantren. Sejak pertama kali didirikan oleh Wali Songo. Ciri khas kultural yang terdapat dalam pesantren salaf, antara lain: Peserta didik sangat menghormati dan santun kepada Kiai, guru dan seniornya. Peserta didik senior tidak melakukan tindak kekerasan pada juniornya. Hukuman atau sanksi yang dilakukan biasanya bersifat non-fisikal seperti dihukum mengaji atau menyapu atau mengepel, dan lain sebagainya.

Dalam berpakaian keseharian peserta didik laki-laki memakai sarung. Berafiliasi kultural ke Nahdlatul Ulama (NU) dengan kekhasan fikih bermadzhab Syafi'i, akidah tauhid bermadzhab Asy'ariyah atau Maturidiyah, dan mengajarkan ilmu tasawuf seperti karya Al Ghazali dan lainnya. Amaliyah khas seperti shalat tarawih 20 rakaat plus 3 rakaat witr pada bulan Ramadan, membaca qunut pada shalat Subuh, membaca tahlil pada tiap malam Jum'at, peringatan Maulid Nabi atau melakukan pembacaan kitab-kitab maulid, peringatan Isra' Mi'raj, dan sebagainya. Dalam sistem penerimaan peserta didik tanpa menggunakan seleksi. Setiap peserta didik yang masuk langsung diterima. Sedangkan penempatan kelas sesuai dengan kemampuan dasar ilmu agama yang dimiliki sebelumnya.

Kurikulum pesantren modern dikenalkan oleh pesantren Gontor. Hal ini dikarenakan pengasuh Ponpes Daarul Rahman lulusan dari Ponpes Gontor. Ponpes Daarul Rahman selain menggunakan system *salafiyah* juga menggunakan sistem pesantren modern. Sistem Ponpes modern berkonotasi kepada nilai-nilai budaya kemodernan yang positif yakni: disiplin, rapi, tepat waktu, serta kerja keras. Bentuk nilai fisikal dari Ponpes modern yakni tergambar dalam cara berpakaian peserta didik laki-laki dengan menggunakan simbol dasi, jas, dan rambut pendek ala militer. Selain itu ciri khas Ponpes modern yakni: menekankan Bahasa Arab dalam percakapan keseharian, menggunakan buku-buku literatur bahasa Arab kontemporer (buku

klasik/kitab kuning). Memiliki sekolah formal dibawah kurikulum Kementerian Agama. Serta tidak menggunakan sistem pengajian tradisional seperti *sorogan*, *wetonan*, dan *bandongan*.

Melihat sisi baik dari kedua sistem tersebut, pendiri Ponpes Daarul Rahman menggabungkan dua sistem kurikulum Ponpes yang masih dianggap relevan dalam tuntutan zaman. Ponpes Daarul Rahman menggunakan kurikulum Ponpes modern yakni: mengedepankan kepada nilai-nilai budaya kemodernan yang positif seperti: disiplin, rapi, tepat waktu, serta kerja keras. Dalam hal keseharian peserta didik laki-laki menggunakan baju kokoh dan sarung. Menekanan bahasa Arab dan Inggris dalam percakapan keseharian. Menggunakan buku-buku literatur Bahasa Arab Kontemporer (buku klasik/kitab kuning).

Ponpes Daarul Rahman memiliki sekolah formal dibawah Kemenag (Tsanawiyah/Alyah). Masih menggunakan sistem pengajian tradisional seperti *sorogan*, *wetonan*, dan *bandongan* dalam hal belajar kitab kuning. Serta nilai – nilai pesantren *salafiyah* yang masih dipegang teguh dalam pembelajaran keseharian Ponpes Daarul Rahman. Hanya saja dalam sistem penerimaan peserta didik Ponpes Daarul Rahman menggunakan seleksi penerimaan peserta didik baru untuk tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan keterbukaan kepada masyarakat.

Penerapan MBS akan dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan sekolah. Dengan MBS akuntabilitas dan keterlibatan guru dapat menjadi lebih tinggi.

Ini sesuai dengan hasil penelitian Agasisti dan Zoido di USA yang menyatakan:

Efisiensi rata-rata sekolah adalah sekitar 70%, yang berarti pencapaian tersebut skor dapat dinaikkan hingga 30% dengan menggunakan penggunaan sumber daya yang tersedia secara lebih efektif. Praktik terkait dengan akuntabilitas, keterlibatan guru dan pengembangan profesional, dan kegiatan ekstrakurikuler juga secara positif terkait dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi (Agasisti & Zoido, 2019).

Penelitian lainnya dari Edwards yang membahas tentang MBS tentang tingginya partisipasi masyarakat United States dalam membantu penyelenggaraan pendidikan mengungkapkan: Tingginya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan konsep yang berkaitan dengan teori sistem, modal sosial, dan pemberdayaan masyarakat (Edwards, 2019). Dalam hal ini, Ponpes Daarul Rahman yang sejarah berdirinya dari keinginan masyarakat adanya Ponpes ini. Dilihat dari awal berdirinya Ponpes yang berasal dari suatu rumah di daerah Senopati yang menghibahkan tempatnya untuk masyarakat belajar agama. Prinsip partisipasi ini sudah terlihat dari awal berdirinya Ponpes. Kemitraan yang dibangun para pendiri Ponpes dalam membesarkan Ponpes yang tertua di Jakarta ini untuk tetap eksistensi hingga saat ini.

Melihat dari terus meningkatnya jumlah peminat yang belajar di Ponpes Daarul Rahman. Hal ini berjalan sesuai dengan Undang-undang republik Indonesia tentang sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 25 menyatakan: Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan (Undang-Undang Nomor 20, 2003).

Ponpes Daarul Rahman yang saat ini memiliki sepuluh ribu alumni yang tersebar diseluruh Indonesia (Rozak, 2017). Jumlah alumni Ponpes Daarul Rahman merupakan modal dasar yang kuat dalam berkiprah di masyarakat. Alumni Ponpes Daarul Rahman telah berkiprah diberbagai profesi diantaranya : pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah, akademisi, aktivis partai, aktivis organisasi masyarakat, jurnalis, pengusaha dan profesi lainnya. Alumni Ponpes Daarul Rahman yang bekerja di bidang pendidikan telah membuat 73 lembaga pendidikan dengan ribuan peserta didik (daarul rahman.com). Sebagian besar lembaga yang mereka dirikan berbentuk Ponpes. Lembaga pendidikan yang didirikan tersebar di Jawa dan Madura.

Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan, penulis melihat bahwasannya Ponpes Daarul Rahman telah terakreditasi A. Beberapa keunikan yang penulis lihat pada Ponpes Daarul Rahman diantaranya satu-satunya satuan pendidikan muadalah di DKI Jakarta. Salah satu persyaratan untuk menjadi penyelenggara Ponpes Muadalah yakni dengan memiliki jumlah peserta didik minimal pertahun sebanyak 300 peserta didik selama 10 tahun berturut-turut.

Pendidikan Muadalah menurut Peraturan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan *mu'allimin* secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jejang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama (Permenag Nomor 18, 2014).

Kitab kuning merupakan literatur berbahasa Arab yang menjadi rujukan keilmuan islam di pesantren. Selanjutnya dirasah islamiyah adalah kumpulan kajian tentang ilmu Agama Islam yang tersusun secara sistematis, terstruktur, dan terorganisasi (madrasy). Pola pendidikan *mu'allimin* adalah sistem pendidikan pesantren yang bersifat integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra dan ko-kurikuler. Selanjutnya penelitian de Hoyos menyebutkan bahwa sistem pembelajaran tidaklah lepas dari adanya partisipasi masyarakat yang mengungkapkan:

Peserta didik, guru dan orang tua disebut sekolah, jika tahu bahwa nilai mereka rendah, hal ini dapat memicu proses evaluasi dan analisis diri. Proses itu sendiri dapat mengarah pada peningkatan hasil pembelajaran. Hal ini sekolah tidaklah merasa di "mempermalukan". Hal ini justru berdampak motivasi intrinsik terkait dengan peringkat sekolah relatif terhadap orang lain. Kesadaran hal ini merupakan kompensasi program yang telah dijalankan dan tanggung jawab bersama dalam tantangan meningkatkan hasil belajar (de Hoyos, Garcia-Moreno, & Patrinos, 2017).

Hal ini menunjukkan proses pembelajaran lebih penting dari pada nilai yang menjadi tujuan pembelajaran. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki efek positif untuk para peserta didik dalam pembelajaran.

Hal ini juga sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab III Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4 Ayat 6 menyatakan: Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan (Undang-Undang Nomor 20, 2003). Diperkuat pada Bab XV peran serta masyarakat dalam pendidikan pasal 54 ayat 1 dan 2 yang menyatakan: (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan (Undang-Undang Nomor 20, 2003). Pentingnya masyarakat dalam penyelenggaraan di satuan pendidikan, hal ini telah diatur dalam undang-undang yang menunjukkan prinsip partisipasi dalam penerapan MBS di satuan pendidikan.

Ponpes Daarul Rahman sebagai satuan pendidikan Muadalah yang memperoleh bantuan keuangan dari Kementerian Agama. Ini berjalan sejak tahun 1998 awal adanya Ponpes yang menyelenggarakan pendidikan Muadalah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.IV/PP.032/KSP/80/98 tentang Pemberian Status Disamakan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Pondok Pesantren Daarul Rahman Kebayoran Baru Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya SK tersebut maka Ponpes Daarul Rahman berhak mendapatkan bantuan keuangan dalam penyelenggaraan pendidikannya di Ponpes tersebut.

Bantuan pendanaa ini tentu saja sangat membantu pelaksanaan pendidikan. Sumber keuangan lainnya adalah dari sumbangan peserta didik dan bantuan donatur lainnya. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 dalam penjelasan Pendidikan Berbasis Masyarakat Pasal 55 ayat 3 dan 4 yakni: (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Tanggung jawab pendanaan pendidikan juga dijelaskan pada Pasal 46 ayat 1 yakni: Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat (Undang-Undang Nomor 20, 2003). Hal ini juga sejalan dengan penerapan MBS di sekolah memperoleh beberapa keuntungan seperti meningkatnya kepuasan kerja guru serta lebih tertibnya pelaporan keuangan (Arar & Abu-Romi, 2016). Selain itu bisa mengelola stress dan meningkatkan kompetensi emosi (Harris, Jennings, Katz, Abenavoli, & Greenberg, 2016).

Keunikan selanjutnya adalah dari segi jumlah peserta didiknya. Ponpes Daarul Rahman merupakan Ponpes dengan jumlah peserta didik mencapai 3.011 orang. Jumlah ini merupakan yang terbesar di DKI Jakarta berdasarkan data pendis Kementerian Agama. Peserta didik Ponpes Daarul Rahman tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga dari negara lain seperti Kuwait dan Malaysia. Banyaknya jumlah peserta didik di Ponpes Daarul Rahman merupakan indikasi bahwa Ponpes ini telah berkembang dengan baik dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Ponpes ini. Perkembangan Ponpes Daarul Rahman dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.

Saat ini Ponpes Daarul Rahman memiliki dua gedung, yaitu gedung induk di Jagakarsa dan gedung di Leuwiliang.

Sebagai sekolah dengan menerapkan MBS, Ponpes Daarul Rahman telah meraih beberapa prestasi. Hasil wawancara dengan Bapak Fauzi (Bagian direktorat pendidikan dasar dan pondok pesantren kementerian agama Jakarta Selatan) mengatakan bahwa “Ponpes Daarul Rahman merupakan Ponpes terbaik se-Jakarta Selatan”. Ponpes terbaik dalam kriteria Kementerian Agama yakni dengan adanya prestasi Ponpes yang diperoleh serta kelengkapan administrasi. Ponpes Daarul Rahman merupakan juara nasional mempelajari kitab kuning tahun 2017 di Palembang. Serta menang pada lomba Bahasa Inggris tingkat nasional (JurnalDepok.id, 2019). Kelengkapan administrasi yang dimaksud yakni dengan jumlah santri memenuhi kriteria sebagai penyelenggara Ponpes satuan pendidikan muadalah. Selain itu Ponpes Daarul Rahman memiliki akreditasi amat baik (A) yang status ijazahnya “disamakan”. Selain itu, proses pembelajaran pendidikan formal dan ilmu agama dilakukan pada kegiatan pembelajaran yang berada dalam pesantren. Serta memiliki guru yang kualifikasi minimal sarjana. Ponpes Daarul Rahman juga memiliki sumber pembiayaan untuk keberlangsungan pendidikan dalam satu tahun kedepan yang di dukung oleh para alumninya. Keberadaan para alumni pada Ponpes Daarul Rahman sangat menguntungkan. Dengan tingginya keterlibatan alumni dan masyarakat dalam kegiatan Ponpes, hal ini membantu Ponpes dalam menjalankan program pendidikan yang telah direncanakan.

Seperti halnya penelitian Sumarto menyebutkan dengan adanya MBS akan memberikan peluang sekolah untuk mengelola sekolahnya secara otonomi (Sumarto, 2016). Pengelolaan keuangan Ponpes secara otonomi akan memberikan keleluasaan Ponpes dalam mengatur kebutuhan peserta didik lebih terarah dan sesuai dengan tujuan Ponpes. Selain itu, dalam penelitian yang berbeda Lubis mengemukakan bahwa MBS

dapat meningkatkan mutu lulusan (Lubis, 2015). Hal ini menunjukkan bahwasannya indikasi prinsip kemandirian dan keterbukaan dalam implementasi MBS pada Ponpes akan memberikan kontribusi yang besar untuk kemajuan para peserta didik Ponpes.

Peran masyarakat yang merupakan bagian alumni Ponpes Daarul Rahman ini sangat penting untuk kemajuan suatu lembaga pendidikan dalam hal ini Ponpes Daarul Rahman. Sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia tentang sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 Bab III Tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4 Ayat 3 yang menyatakan: Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (Undang-Undang Nomor 20, 2003).

Hal lain di dukung oleh penelitian Bandur di sekolah-sekolah Indonesia yang mengungkapkan bahwa: “Pelaksanaan MBS dengan komite sekolah wajib telah menyebabkan pengambilan keputusan dan kemitraan partisipatif di tingkat sekolah.”(Bandur, 2012b). Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan akan menambah nilai tersendiri untuk kemajuan Ponpes. MBS yang memiliki karakteristik dalam pengelolaan lembaga pendidikan secara mandiri akan memperkuat Ponpes dalam mencapai tujuan pendidikan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan juga dikemukakan oleh Barnett menyatakan:

Keterlibatan masyarakat menjelaskan tingkat berbeda dalam membaca murid dan matematika dasar. Menjelajahi berbagai metode dan kegiatan yang terkait dengan keterlibatan masyarakat mengungkapkan bahwa beberapa kegiatan keterlibatan secara positif terkait dengan pembelajaran murid. Efek positif terkuat berasal dari adanya keterlibatan pembiayaan yang lebih tradisional tanpa adanya umpan balik untuk prestasi murid dan keterlibatan masyarakat sebagai support dukungan dalam pembelajaran (Barnett, 2013).

Penelitian Haruthaithanasan menggambarkan bahwa reformasi kebijakan sekolah pada negara-negara berkembang. Penelitian ini membahas seberapa efektif reformasi sekolah dalam peningkatan organisasi dan motivasi guru dalam peningkatan prestasi peserta didik mengungkapkan:

Efektivitas reformasi sekolah dalam hal peningkatan organisasi secara keseluruhan dan motivasi guru, meskipun bukan diukur dari prestasi peserta didik. Temuan ini mengusulkan implikasi kebijakan untuk meningkatkan reformasi pendidikan saat ini sebagai masalah global, terutama untuk Thailand (Haruthaithanasan, 2018).

Tuntutan masyarakat akan pendidikan dan tuntutan reformasi dalam berbagai bidang kehidupan dan kondisi sosial – ekonomi masyarakat, membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Peraturan ini diperkuat dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah. Pemberlakuan undang-undang dan peraturan ini berimplikasi dalam bidang pendidikan yang melahirkan fenomena kebijakan “baru” dalam hal penyelenggaraan dalam dunia pendidikan. Hal ini berdampak diantaranya : 1) adanya pengaturan perimbangan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 2) pengembangan infrastruktur sosial, 3) penguatan kapasitas manajemen pendidikan pada tingkat Pemerintah Daerah, dan 4) lahirnya tuntutan untuk mengembangkan manajemen partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pendidikan berbasis masyarakat dalam konteks ini adalah pendidikan yang penyelenggaraannya dikelola masyarakat secara otonom, tumbuh atas kebutuhan masyarakat, kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat, memanfaatkan segenap sumber yang tersedia di masyarakat, serta menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Komponen pendidikan berbasis masyarakat terdiri atas: 1) otonomi dan desentralisasi, 2) kurikulum, 3) pemberdayaan, dan 4) partisipasi masyarakat (Nurhattati, 2012).

Perkembangan Ponpes Daarul Rahman tidak terlepas dari peran alumninya. Sebagai lembaga pendidikan yang telah lama terbentuk, tentu saja Ponpes Daarul Rahman memiliki ikatan alumni. Ikatan alumni Ponpes Daarul Rahman dinamakan Ikatan Keluarga Daarul Rahman (IKDAR). IKDAR berdiri pada tahun 1983. Ketua pertama IKDAR adalah KH. Musyfiq Amrullah, Lc. IKDAR yang kini di usianya ke-35, telah memberikan manfaat besar kepada bangsa dan negara ini khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam hal pengembangan pendidikan pesantren, majelis ta'lim, sekolah umum, dan lainnya.

Beberapa bentuk partisipasi anggota IKDAR adalah membantu alumni Ponpes Daarul Rahman melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi. Saat ini jumlah mahasiswa yang dididik yang dibiayai oleh IKDAR 82 orang, membantu memberikan pelatihan kepada peserta didik maupun membangun kerja sama dengan organisasi atau lembaga lain. Partisipasi alumni ini pada dasarnya adalah bagian Manajemen Berbasis Sekolah dengan mengoptimalkan semua unsur yang ada.

Hal ini juga diatur dalam Undang-undang republik Indonesia tentang sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 dalam penjelasan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah Pasal 56 Ayat 1, 2 dan 3 yakni:

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Undang-Undang Nomor 20, 2003).

Peran IKDAR dalam membantu Ponpes Daarul Rahman dalam kegiatan pembelajarannya merupakan aset besar untuk tetap berdirinya suatu Ponpes. Hal ini

juga dikemukakan dalam hasil penelitian para alumni Universitas Harvard yang menggunakan dana sumbangan 40-50% dari para alumni untuk mempelancar kegiatan di kampus. Hal ini terdapat dalam pernyataan hasil penelitian Yuanyuan Li yang menyatakan :

Alumni make up a university's intangible assets, and there is great potential for donations to one's alma mater. This plays a key role in education funding, so attention to and full use of alumni should be done. For example, at Harvard University, alumni donations are as high as 40–50 percent. It is obvious that fundraising by American alumni associations plays an important role in higher education.(Li, 2014)

Bahwasannya kedudukan alumni yang dalam hasil penelitian tersebut menyatakan alumni merupakan aset tidak berwujud dalam membangun universitas, salah satu potensi terbesar untuk menyumbangkan ke almamaternya. Inilah yang merupakan peran penting dalam pendanaan pendidikan, sehingga peran alumni menjadi perhatian penting dalam membantu universitas. Sebagai contohnya, di Universitas Havard sumbangan Alumni hingga mencapai 40 – 50%. Kenyataan ini menjelaskan bahwasannya penggalangan dana asosiasi alumni di Amerika menjadi peran penting dalam Pendidikan Tinggi. Dalam hal ini alumni Ponpes Daarul Rahman ini juga melakukan hal yang sama dengan para alumni di Amerika tersebut dalam membantu penyelenggaraan pendidikan di Ponpes Daarul Rahman, sehingga Ponpes Daarul Rahman tetap menjaga eksistensinya dalam dunia pendidikan hingga saat ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penulis tertarik peneliti ***Pengelolaan Pondok Pesantren Dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah pada Ponpes Daarul Rahman Jagakarsa Kota Jakarta Selatan.***

B. Pembatasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan keterbatasan peneliti maka pembatasan dalam penelitian ini waktu penelitian selama 1 tahun. Bertempat di Yayasan Ponpes Daarul Rahman yang memiliki dua tipe pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama (Ponpes Daarul Rahman I dan II) dan Dinas Pendidikan (Ponpes Daarul Rahman III). Peneliti mengambil tipe pondok pesantren yang berada pada naungan Kementerian Agama. Pondok pesantren yang berada di Jakarta dibawah naungan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan Pendidikan Muadalah. Penelitian ini juga dibatasi pada pengelolaan pondok pesantren Satuan Pendidikan Muadalah dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah yang dibatasi dalam pengelolaan sumber daya, pengelolaan peserta didik, pengelolaan keuangan serta pengelolaan kurikulum di Ponpes Daarul Rahman Jagakarsa Kota Jakarta Selatan.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pembatasan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan sumber daya manusia di Ponpes Daarul Rahman?
2. Bagaimana pengelolaan peserta didik di Ponpes Daarul Rahman?
3. Bagaimana pengelolaan keuangan di Ponpes Daarul Rahman?
4. Bagaimana pengelolaan kurikulum di Ponpes Daarul Rahman?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini menguraikan hasil penelitian yang berkaitan dengan Pengelolaan Pesantren Daarul Rahman Jagakarsa Kota Jakarta Dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian untuk :

1. Menguraikan dan menganalisis pengelolaan Ponpes Daarul Rahman dari sisi pengelolaan sumber daya manusia.
2. Menguraikan dan menganalisis pengelolaan Ponpes Daarul Rahman dari sisi pengelolaan peserta didik.
3. Menguraikan dan menganalisis pengelolaan Ponpes Daarul Rahman dari sisi pengelolaan keuangan.
4. Menguraikan dan menganalisis pengelolaan kurikulum Ponpes Daarul Rahman.

E. Signifikansi Penelitian

Ilmu manajemen pendidikan pada dasarnya membahas tentang bagaimana mengelola (merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengawasi) pelaksanaan pendidikan. Dalam mengelola pendidikan tersebut, terdapat tujuh bidang garapan manajemen pendidikan. Tujuh garapan manajemen pendidikan manajemen kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan, tata kelola dan hubungan masyarakat.

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan pondok pesantren melalui konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Daarul Rahman Jagakarsa – Jakarta. Melihat judulnya, tentu saja penelitian ini sangat berkaitan dengan bidang garapan manajemen pendidikan. Pembahasan tentang MBS pada dasarnya bagian dari bidang garapan tata kelola pendidikan. Penelitian ini akan memberikan gambaran pelaksanaan tata kelola (khususnya MBS) di Ponpes Daarul Rahman.

F. Kebaruan Penelitian

Pada latar belakang sudah dijabarkan beberapa hasil penelitian berdasarkan bibliometrik VOSviewer dalam publikasi *Semantik Scholar* yang menjadi acuan dalam penelitian ini. *Reasearch gap* dalam penelitian ini dijabarkan sebagai pengelolaan pondok pesantren dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Beberapa hasil penelitian terdahulu terdapat keterkaitan dengan penelitian ini, namun belum dibahas secara tuntas, kesenjangan inilah yang menjadi *novelty* dari penelitian ini. Berikut beberapa penelitian tentang MBS terdahulu sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Negara	Tahun	Metode Penelitian	Subjek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Tommaso Agasisti dan Pablo Zoido	The efficiency of schools in developing countries, analysed through PISA 2012 data	USA	2019	Kualitatif	Guru	Efisiensi rata-rata sekolah adalah sekitar 70%, yang berarti pencapaian tersebut skor dapat dinaikkan hingga 30% dengan menggunakan penggunaan sumber daya yang tersedia secara lebih efektif. praktik terkait dengan akuntabilitas, keterlibatan guru dan pengembangan profesional, dan kegiatan ekstrakurikuler juga secara positif terkait dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi.
2.	Donald Brent Edwards	Shifting the perspective on community-based management of education: From sistems theory to social capital and	United States	2019	Kualitatif	Masyarakat	Membahas partisipasi masyarakat terhadap pendidikan konsep yang berkaitan dengan teori sistem, modal sosial, dan pemberdayaan masyarakat

		community empowerment					
3.	Edward M. Barnett	An analysis of community involvement in primary schools in Malawi	Afrika	2013	Kualitatif	Masyarakat	Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat menjelaskan tingkat berbeda dalam membaca murid dan matematika dasar. Menjelajahi berbagai metode dan kegiatan yang terkait dengan keterlibatan masyarakat mengungkapkan bahwa beberapa kegiatan keterlibatan secara positif terkait dengan pembelajaran murid. Efek positif terkuat berasal dari adanya keterlibatan pembiayaan yang lebih tradisional tanpa adanya untuk timbal balik untuk prestasi murid dan keterlibatan masyarakat sebagai support dukungan dalam pembelajaran.
4	Harry Anthony Patrinos	The impact of an accountability intervention with diagnostic feedback: Evidence from Mexico Rafael	Mexico	2017	kualitatif	Teacher	Hasilnya menunjukkan bahwa ketika peserta didik, guru dan orang tua di sebuah sekolah tahu bahwa skor mereka rendah, ini dapat memicu proses evaluasi dan analisis diri, dan proses itu sendiri dapat mengarah pada peningkatan hasil pembelajaran. Hal ini sekolah tidaklah merasa di "mempermalukan"

							<p>untuk sekolah PAE di Colima, mungkin ada dampak motivasi intrinsik terkait dengan peringkat sekolah relatif terhadap orang lain. Karena ini merupakan kompensasi program yang telah dijalankan dan tanggung jawab bersama otoritas negara dalam tantangan meningkatkan hasil belajar. Menurut analisis ini, bukan input yang disediakan oleh PAE yang mengarah pada perbaikan. Sebaliknya itu adalah nilai pensinyalan dari program yang menghasilkan peningkatan nilai tes.</p>
5.	Theera Haruthait hanasan	Effects of educational reforms in the 2nd decade (2009–2018) on teacher motivation and student achievement among schools in Southern Thailand	Thailand	2019	Kuantitatif	Guru	<p>Temuan penelitian ini secara wajar mengkonfirmasi kerangka kerja teoritis, dan mencerminkan beberapa efektivitas reformasi sekolah dekade ke-2 dalam hal peningkatan organisasi secara keseluruhan dan motivasi guru, meskipun bukan prestasi peserta didik. Temuan kunci dibahas dengan lensa teori kritis untuk menggambarkan Thailand sebagai contoh studi kasus</p>

							negara berkembang dan berjuang dengan reformasi sekolah global, dan kemudian mengusulkan implikasi kebijakan untuk meningkatkan reformasi pendidikan saat ini sebagai masalah global, terutama untuk Thailand.
6.	Agustinus Bandur	School-based management development and partnership: Evidence from Indonesia.	Indonesia	2012	Mixed-method research	Komite Sekolah	Pelaksanaan MBS dengan komite sekolah wajib telah menyebabkan pengambilan keputusan dan kemitraan partisipatif di tingkat sekolah.
7.	Khalid Arar dan Amal Abu-Romi	School-based management: Arab education sistem in Israel	Israel	2016	Quantitative research	Guru	Guru yang mengajar di sekolah dengan pengalaman dalam MBS melaporkan tingkat kepuasan tertinggi sementara guru yang mengajar di sekolah yang tidak menggunakan MBS melaporkan tingkat kepuasan terendah. Dimensi kepuasan yang paling berpengaruh adalah partisipasi guru dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, terdapat *research gap* dengan penelitian ini. MBS sebelumnya membahas adanya partisipasi masyarakat yang tidak adanya keterkaitan langsung dengan sekolah atau organisasi itu sendiri. Akan tetapi, peneliti menemukan adanya partisipasi masyarakat yang

khususnya alumni yang secara emosional memiliki keterkaitan dengan pondok pesantren serta pengelolaan MBS yang mengacu pada persetujuan Kiai. Konsep MBS yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam penelitian ini membahas pengambilan keputusan Kiai dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lebih membahas penyelenggaraan pendidikan *Muadalah* hanya dari sisi kurikulumnya, melainkan dilihat dari konteks MBS dalam sisi pengelolaan sumberdaya manusia, pengelolaan keuangan, pengelolaan peserta didik dan pengelolaan kurikulum.

